

FORMAT PELAPORAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN KEPADA KEPALA SKPKD

A. Laporan HPKD Yang Dipisahkan

Laporan HPKD Yang Dipisahkan merupakan rekapitulasi realisasi seluruh
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang disampaikan SKPD
kepada Kepala SKPKD dengan format sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
.....
Jln.

LAPORAN REKAPITULASI PENERIMAAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN
BULAN :
TAHUN :

KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)			%	+/-
			S/D. BLN LALU	BLN INI	S/D. BLN INI		Rp
			4	5	6	7 = (6/3)	8 = (6 - 3)
4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN						
4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/ BUMD						
4.1.3.01.02	PT. Bank Jabar						
4.1.3.01.03	BPR/LPK						
	BPR						
	- BPR Kab. Serang						
	- BPR Saketi						
	- BPR Malingping						
	- BPR Cipanas						
	- BPR Warunggunung						
	- BPR. Kertaraharja Tangerang						
	- Dst						
	LPK						
	- LPK Kab. Tangerang (10)						
	- LPK Cimanuk						
	- LPK Cibaliung						
	- LPK Sobang/Cigeulis						
	- LPK Pandeglang						
	- LPK Cadasari						
	- LPK Labuan						
	- LPK Bojong						
	- LPK Maja						
	- LPK Panganggaran						
	- LPK Rangkasbitung						
	- LPK Banjarsari						
	- LPK Bayah						
	- LPK Muncang						
	- LPK Leuwidamar						
	- LPK Cimarga						
	- LPK Gunung Kencana						
	- Dst						

HPKD Yang Dipisahkan							
KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)			%	+/-
			S/D. BLN LALU	BLN INI	S/D. BLN INI		Rp
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3)	8 = (6 - 3)
4.1.3.01.04	PT BGD						
4.1.3.01.05	Dst						
	J U M L A H						
4.1.3.03	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta						
4.1.3.03.01	Perusahaan Patungan						
4.1.3.03.02	Dst ...						
	J U M L A H						
	J U M L A H TOTAL						

..... 20....

KEPALA SKPD
PROVINSI BANTEN

.....
NIP.

- Cara Pengisian HPKD Yang Dipisahkan :
- Kolom 1 (Kode Rekening) diisi dengan Nomor Rekening Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - Kolom 2 (Uraian Penerimaan) diisi dengan nama Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - Kolom 3 (Jumlah Target) diisi dengan target Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - Kolom 4 (Realisasi s/d bulan lalu (Rp.) diisi dengan realisasi Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan s/d bulan lalu
 - Kolom 5 (Realisasi bulan ini (Rp.) diisi dengan realisasi Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada bulan ini
 - Kolom 6 (Realisasi s/d bulan ini (Rp.) diisi dengan realisasi Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada s/d bulan ini
 - Kolom 7 (Presentase (%)) diisi dengan presentase penerimaan Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - Kolom 8 (Sisa target / Over target (Rp.) diisi dengan Sisa target / Over target penerimaan Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

* Format diisi oleh SKPD yang melaksanakan Tupoksi Pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan disampaikan pada SKPKD selaku PPKD selambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

B. Laporan HPKD Yang Dipisahkan untuk Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD (HPKD Yang Dipisahkan 1)

Laporan HPKD Yang Dipisahkan untuk komponen Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD (HPKD Yang Dipisahkan 1) merupakan rekapitulasi realisasi pengelolaan HPKD Yang Dipisahkan atas Penyertaan modal yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Banten pada Perusahaan Daerah/BUMD. Dilaporkan setiap bulannya oleh unit organisasi terkait yang melaksanakan tupoksi pengelolaan laporan HPKD Yang Dipisahkan untuk komponen Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD, disampaikan pada Kepala DPKAD selaku PPKD.

Cara pengisian HPKD Yang Dipisahkan 1:

1. Kolom 1 (Nomor) diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2 (Nama Badan/Lembaga) diisi dengan masing-masing nama badan/lembaga yang mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Banten;
3. Kolom 3 (Rencana Jumlah Penyertaan Modal Daerah) diisi dengan jumlah Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Penyertaan Modal Daerah dari masing-masing nama badan/lembaga;
4. Kolom 4 (Dasar Hukum Penyertaan) diisi dengan Peraturan/Payung hukum yang mendasari pelaksanaan Penyertaan Modal terhadap Badan/Lembaga;
5. Kolom 5 (Jumlah modal yang telah disertakan, s/d Bulan lalu) diisi dengan Jumlah modal yang telah disertakan s/d bulan lalu kepada masing-masing badan/lembaga;
6. Kolom 6 (Deviden, s/d Bulan lalu) diisi dengan jumlah Deviden yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten atas Penyertaan modal yang telah diberikan pada masing-masing badan/lembaga s/d bulan lalu;
7. Kolom 7 (Jumlah Sisa Modal s/d Bulan lalu) diisi dengan jumlah sisa modal yang belum disertakan pada masing-masing badan/lembaga s/d bulan lalu;
8. Kolom 8 (Jumlah modal yang telah disertakan, pada Bulan ini) diisi dengan Jumlah modal yang telah disertakan pada bulan ini kepada masing-masing badan/lembaga;
9. Kolom 9 (Deviden, pada Bulan ini) diisi dengan jumlah Deviden yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten atas Penyertaan modal yang telah diberikan pada masing-masing badan/lembaga pada bulan ini;
10. Kolom 10 (Jumlah Sisa Modal pada Bulan ini) diisi dengan jumlah sisa modal yang belum disertakan pada masing-masing badan/lembaga pada bulan ini;
11. Kolom 11 (Jumlah modal yang telah disertakan, s/d Bulan ini) diisi dengan Jumlah modal yang telah disertakan s/d bulan ini kepada masing-masing badan/lembaga;
12. Kolom 12 (Deviden, s/d Bulan ini) diisi dengan jumlah Deviden yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten atas Penyertaan modal yang telah diberikan pada masing-masing badan/lembaga s/d bulan ini;
13. Kolom 13 (Jumlah Sisa Modal s/d Bulan ini) diisi dengan jumlah sisa modal yang belum disertakan pada masing-masing badan/lembaga s/d bulan ini;



DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH / BUMD
BULAN TAHUN ANGGARAN

No.	Nama Badan/Lembaga	Rencana Jumlah Penyertaan Modal Daerah (Rp)	Dasar Hukum Penyertaan	S.D Bulan Lalu			Bulan Ini			S.D Bulan Ini		
				Jumlah Modal Yang Telah Disertakan (Rp)	Deviden (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Rp)	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan (Rp)	Deviden (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Rp)	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan (Rp)	Deviden (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Bank Jabar											
	JUMLAH											
II.	PT BGD											
	JUMLAH											
III.	BPR a. BPR Kab. Serang b. BPR Saketi c. BPR Malingping d. BPR Cipanas e. BPR Warunggunung f. BPR. Kertaraaharja Tangerang g. Dst											
	JUMLAH											
IV.	LPK a. LPK Kab. Tangerang (10) b. LPK Cimanuk c. LPK Cibaliung d. LPK Sobang/Cigeulis e. LPK Pandeglang f. LPK Cadasari g. LPK Labuan h. LPK Bojong i. LPK Maja j. LPK Panganggaran k. LPK Rongkasbitung											

HPKD Yang Dipisahkan 1

HPKD Yang Dipisahkan 1												
No.	Nama Badan/Lembaga	Rencana Jumlah Penyertaan Modal Daerah (Rp)	Dasar Hukum Penyertaan	S.D Bulan Lalu			Bulan Ini			S.D Bulan Ini		
				Jumlah Modal Yang Telah Disertakan (Rp)	Deviden (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Rp)	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan (Rp)	Deviden (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Rp)	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan (Rp)	Deviden (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	l. LPK Banjarsari m. LPK Bayah n. LPK Muncang o. LPK Leuwidamar p. LPK Cimarga q. LPK Gunung Kencana r. Dst											
	JUMLAH											
V.	Dst											
	JUMLAH											
	JUMLAH TOTAL											

....., Bln/Tahun

Kepala SKPD

Provinsi Banten

.....

NIP.

C. Laporan HPKD Yang Dipisahkan untuk Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta (HPKD Yang Dipisahkan 2)

Laporan HPKD Yang Dipisahkan untuk komponen Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta (HPKD Yang Dipisahkan 2) merupakan rekapitulasi realisasi pengelolaan HPKD Yang Dipisahkan atas Penyertaan modal yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Banten pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta. Dilaporkan setiap bulannya oleh unit organisasi terkait yang melaksanakan tupoksi pengelolaan laporan HPKD Yang Dipisahkan untuk komponen Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, disampaikan pada Kepala DPKAD selaku PPKD.

Cara pengisian HPKD Yang Dipisahkan 2:

1. Kolom 1 (Nomor) diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2 (Nama Badan/Lembaga) diisi dengan masing-masing nama badan/lembaga yang mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Banten;
3. Kolom 3 (Rencana Jumlah Penyertaan Modal Daerah) diisi dengan jumlah Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Penyertaan Modal Daerah dari masing-masing nama badan/lembaga;
4. Kolom 4 (Dasar Hukum Penyertaan) diisi dengan Peraturan/Payung hukum yang mendasari pelaksanaan Penyertaan Modal terhadap Badan/Lembaga;
5. Kolom 5 (Jumlah modal yang telah disertakan, s/d Bulan lalu) diisi dengan Jumlah modal yang telah disertakan s/d bulan lalu kepada masing-masing badan/lembaga;
6. Kolom 6 (Deviden, s/d Bulan lalu) diisi dengan jumlah Deviden yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten atas Penyertaan modal yang telah diberikan pada masing-masing badan/lembaga s/d bulan lalu;
7. Kolom 7 (Jumlah Sisa Modal s/d Bulan lalu) diisi dengan jumlah sisa modal yang belum disertakan pada masing-masing badan/lembaga s/d bulan lalu;
8. Kolom 8 (Jumlah modal yang telah disertakan, pada Bulan ini) diisi dengan Jumlah modal yang telah disertakan pada bulan ini kepada masing-masing badan/lembaga;
9. Kolom 9 (Deviden, pada Bulan ini) diisi dengan jumlah Deviden yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten atas Penyertaan modal yang telah diberikan pada masing-masing badan/lembaga pada bulan ini;
10. Kolom 10 (Jumlah Sisa Modal pada Bulan ini) diisi dengan jumlah sisa modal yang belum disertakan pada masing-masing badan/lembaga pada bulan ini;
11. Kolom 11 (Jumlah modal yang telah disertakan, s/d Bulan ini) diisi dengan Jumlah modal yang telah disertakan s/d bulan ini kepada masing-masing badan/lembaga;
12. Kolom 12 (Deviden, s/d Bulan ini) diisi dengan jumlah Deviden yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten atas Penyertaan modal yang telah diberikan pada masing-masing badan/lembaga s/d bulan ini;
13. Kolom 13 (Jumlah Sisa Modal s/d Bulan ini) diisi dengan jumlah sisa modal yang belum disertakan pada masing-masing badan/lembaga s/d bulan ini;



DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PADA PERUSAHAAN PATUNGAN/MILIK SWASTA
BULAN TAHUN ANGGARAN

HPKD Yang Dipisahkan 2												
No.	Nama Badan/Lembaga	Rencana Jumlah Penyertaan Modal Daerah (Rp)	Dasar Hukum Penyertaan	S.D Bulan Lalu			Bulan Ini			S.D Bulan Ini		
				Jumlah Modal Yang Telah Disertakan (Rp)	Deviden (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Rp)	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan (Rp)	Deviden (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Rp)	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan (Rp)	Deviden (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Uraian/Rincian Uraian/Rincian											
	JUMLAH											
II.	Uraian/Rincian Uraian/Rincian											
	JUMLAH											
III.	Uraian/Rincian Uraian/Rincian											
	JUMLAH											
IV.	Dst											
	JUMLAH											
	JUMLAH TOTAL											

..... Bln/Tahun
Kepala SKPD
Provinsi Banten

.....
NIP.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH